

Secercah Cahaya Menuju Kesejahteraan Perempuan

(sebuah kajian)



Kementerian Sosial RI
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Direktorat Pemberdayaan Keluarga
Tahun 2010

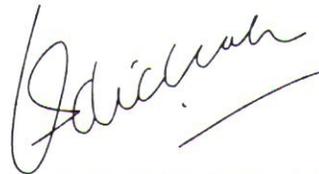
KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan pada dzat yang Maha Kuasa. Atas limpahan rahmat-Nya, upaya merumuskan indikator kesejahteraan perempuan telah diberi titik terang. Direktorat Pemberdayaan Keluarga berinisiasi merumuskan indikator kesejahteraan sosial perempuan yang dimulai dari kajian literasi. Atas dukungan berbagai kalangan, baik para profesional, praktisi, akademisi dan aparat birokrasi yang kompeten telah memformulasikan indikator kesejahteraan perempuan tersebut menurut perspektif keilmuannya masing-masing.

Tiga puluh tulisan faktual dan aktual telah dihasilkan dan secara keseluruhan diberi tema “ *Secercah Cahaya Menuju Kesejahteraan Perempuan (Sebuah Kajian)* “. Tulisan merupakan karya original penulisannya yang terlahir dari hasil penelitian, hasil pengamatan, hasil pengalaman lapangan dan hasil perenungan imajinatif yang dituangkan yang dituangkan secara dinamis sebagai petualangan ilmiah.

Kami menyadari bahwa tulisan ini masih memerlukan masukan-masukan yang lebih membangun untuk kepentingan perempuan serta peningkatan kontribusi bagi peningkatan pembangunan pemberdayaan perempuan.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat, selamat membaca !



Dra. Hartati Solekhah, MM
Direktur Pemberdayaan Keluarga

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
<i>Penulis : Drs. Agus Elia, Msi</i> Aktualisasi Perempuan Karier	1
<i>Penulis : DR. Bambang Rustanto, Msi</i> Gerakan Perempuan Dari Organisasi Ke Parlemen	10
<i>Penulis : DR. Carolina Nitimihardjo, Msi</i> Hak Azasi Sosial Politik Perempuan	23
<i>Penulis : Dra. Rokna Murni, Msi</i> Kekuatan Perempuan Dalam Organisasi Akar Rumput	40
<i>Penulis : Dra. Susiladiharti, Msi</i> Nilai Yang Menghambat Kemajuan Perempuan	52
<i>Penulis : Dra. A. Diana Handayani</i> Perempuan Dalam Tujuan MDGS	60
<i>Penulis : Dra. Tuti Kartika</i> Pemimpin Perempuan Dan Transformasi Ruang Publik	77
<i>Penulis : Dra. Tuti Kartika</i> Indikator Kesejahteraan Perempuan	93
<i>Penulis : Drs. Aan Zaenal Hafidz, Msi</i> Keberfungsian Sosial Pada Perempuan Rentan	110

<i>Penulis : Drs. Aan Zaenal Hafidz, Msi</i> Resistensi Perempuan Sebagai Kepala Keluarga	P S	127
<i>Penulis : Drs. Agus Elia, Msi</i> Perempuan Kerja Dan Kesejahteraan	P P	145
<i>Penulis : Drs. Anwar Sitepu, Msi</i> Relasi Gender Pada Perempuan Pekerja Migran	P E	157
<i>Penulis : Dra. Nurani Kusnadi, Msi</i> Peran Perempuan Diluar Rumah		171
<i>Penulis : Dra. Nurani Kusnadi, Msi</i> Aktifitas Perempuan Dalam Kebutuhan Praktis Dan Strategis		187
<i>Penulis : DR. Titik Sumarti</i> Strategi Nafkah Rumah Tangga		201
<i>Penulis : Drs. Anwar Sitepu, Msi</i> Kekerasan Perempuan Sebagai Pekerja Migran		214
<i>Penulis : DR. Bambang Rustanto, Msi</i> Perempuan Dalam Kehidupan Berkelanjutan		229
<i>Penulis : DR. Carolina Nitimihardjo, MSi</i> Perempuan Dan HIV/AIDS		242
<i>Penulis : Dra. Susilawati, MSi (AZ)</i> Gangguan Kepribadian Perempuan		254
<i>Penulis : Dra. Susiladiharti, Msi (BR)</i> Metamorfosis Perempuan Dari Anak Jalanan Menjadi Pekerja Seks Jalanan		268

<i>Penulis : Drs. Miran, MM</i> Segregasi Dan Kemiskinan Perempuan	278
<i>Penulis : Drs. Miran, MM</i> Perempuan Disable Dan Permasalahannya	294
<i>Penulis : DR. Titik Sumarti (AZ)</i> Peranan Perempuan Yang Terputus	307
<i>Penulis : Dra. Rokna Murni, Msi</i> Pemberdayaan Perempuan Pasca Reformasi	319
<i>Penulis : Dra. Susilawati, Msi (BR)</i> Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Miskin	336
<i>Penulis : DR. Sulikanti Agusni</i> Perempuan Ke Gender Dalam Pembangunan : Transformasi Dari WID ke GAD	345
<i>Penulis : DR. Sulikanti Agusni (BR)</i> Keberdayaan Perempuan Berbasis Masyarakat	353
<i>Penulis : Dra. Wirianingsih</i> Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Gender	362
<i>Penulis : Dra. Wirianingsih</i> Kekuatan Kelompok Perempuan	375
<i>Penulis : Dra. A. Diana Handayani (AZ)</i> Dinamika Organisasi NGO Perempuan	388

STRATEGI NAFKAH RUMAHTANGGA DAN POSISI KAUM PEREMPUAN

Oleh: Titik Sumarti

ABSTRAKS

Memaparkan kualitas hidup kaum perempuan seolah tak bisa dilepaskan dari fenomena kemiskinan yang masih berlangsung disekitar kita. Deskripsi sebagian besar peneliti terutama mereka yang banyak bekerja di wilayah pedesaan terhadap kualitas hidup kaum perempuan akan menggambarkan sosok perempuan yang bekerja keras sebagai buruh tani, pekebun, pedagang ikan, pekerja keluarga tak dibayar dalam usaha tani/ternak/industri rumahtangga, buruh pabrik maupun buruh migran ke luar negeri. Dalam kegiatan nafkah tersebut, rata-rata mereka mencurahkan waktu lebih lama dari laki-laki namun karena pendidikan yang relatif lebih rendah dari laki-laki serta masih adanya anggapan bahwa "kerja perempuan adalah kerja membantu mencari nafkah bagi keluarga" maka upah yang diterimapun relatif lebih rendah dari laki-laki. Secara teoritis, penyebab kondisi kaum perempuan ini dapat dijelaskan dari dua sumber: pertama, masih kuatnya nilai-nilai budaya patriarchy yang melandasi pola pikir pelaku, dan kedua, masih banyaknya masalah kemiskinan yang ditandai dengan pengangguran, pendapatan rumahtangga yang rendah, ketiadaan akses pada sumberdaya alam, teknologi, modal, sosial dan pendidikan.

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks makro, kondisi kualitas hidup kaum perempuan Indonesia dapat dilihat dari indikator HDI (*Human Development Index*), GDI (*Gender Development Index*) dan GEM (*Gender Empowerment Measurement*). Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu meliputi: harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan (<http://www.menegpp.go.id/aplikasidata/>). Gender Development Index atau Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Gender Empowerment Measurement atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup

partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Tabel 1. IPM, IPG, dan IDG Indonesia Tahun 2005-2008

Uraian	2005	2006	2007	2008
IPM	68,7	69,6	70,1	71,17
IPG	63,9	65,1	65,3	66,38
IDG	59,7	61,3	61,8	62,27

Sumber: Pembangunan Berbasis Gender 2006.2007 & 2008, Kementerian PP&PA bekerjasama dengan BPS

Data pada tabel 1. menunjukkan IPG masih lebih rendah dari IPM, yang berarti bahwa keberhasilan pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan pembangunan gender, atau masih terdapat ketimpangan gender. Data tersebut juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan IPG dan IDG selama tahun 2005-2008 yang berarti bahwa Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada pelaksanaan RPJMN 2004 - 2009 telah banyak mencapai kemajuan yang signifikan. Meskipun demikian keterbatasan kesempatan dan partisipasi sebagian besar perempuan terhadap pendidikan yang lebih tinggi, layanan kesehatan dan ekonomi yang lebih baik, dan keterlibatan dalam kegiatan publik (ekonomi, politik dan pengambilan keputusan) masih merupakan permasalahan mendasar.

Kebutuhan akan penjaminan kualitas kehidupan yang lebih baik dan berkeadilan bagi perempuan maupun laki-laki di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat. Hal ini dimulai dari Instruksi Presiden No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah serta yang terakhir adalah Peraturan Menteri Keuangan No.104/2010 tentang Rencana Kerja Anggaran Responsif gender. Di tingkat internasional pun, Pemerintah Indonesia telah menandatangani beberapa kesepakatan sebagai wujud komitmen pemerintah untuk memperjuangkan peningkatan kualitas hidup perempuan maupun laki-laki secara berkeadilan dan berkesetaraan gender. Beberapa kesepakatan tersebut diantaranya adalah Convention on the Political Rights of Women (1952), Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) pada tahun 1979, International Conference on Population and Development (ICPD) di tahun 1994, Beijing Declaration and Platform for Action (BPFA) pada 1995 dan Millenium

Development Goals (MDGs) pada tahun 2001.

Makalah ini hendak menyoroti salah satu masalah kritis dari dua belas masalah kualitas hidup yang dihadapi oleh perempuan dan anak-anak di berbagai kawasan, yaitu masalah perempuan dan ekonomi. Sasaran strategis yang harus dicapai dari masalah kritis perempuan dan ekonomi adalah: (1) Memajukan hak-hak dan kemandirian ekonomi perempuan, termasuk akses mereka atas lapangan kerja, kondisi-kondisi kerja yang memadai serta pengendalian sumber-sumber ekonomi; (2) Memfasilitasi persamaan akses perempuan pada sumber-sumber, kesempatan kerja, pasar dan perdagangan, (3) Menyediakan pelayanan-pelayanan bisnis, pelatihan dan akses atas pasar-pasar, informasi dan teknologi, terutama bagi perempuan yang berpenghasilan rendah, (4) Memperkuat kapasitas ekonomi perempuan dan jaringan kerja komersialnya, (5) Menghapus pengkotak-kotakan jabatan dan semua bentuk diskriminasi ketenaga-kerjaan, (6) Memajukan harmonisasi kerja dengan tanggung jawab terhadap keluarga bagi perempuan dan laki-laki (FORUM LSM untuk Perempuan bekerja sama dengan LBH APIK, 1998).

Hasil dari Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2010 (KPPA, 2010) menyampaikan bahwa masih terdapat permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian, yaitu: masih terjadi kesenjangan pada tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat upah yang diterima, kekerasan terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja diluar negeri, pekerja tak dibayar dan pekerja informal. Pekerjaan perempuan disektor informal biasanya kurang memberikan jaminan perlindungan secara hukum dan jaminan kesejahteraan yang memadai.

Oleh karena itu upaya-upaya pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi perlu dicarikan solusinya dengan menempatkannya pada konteks keluarga (mata pencaharian berkelanjutan dan strategi nafkah rumahtangga), dan konteks permasalahan sosial seperti kemiskinan.

B. KEMISKINAN PEREMPUAN

Fenomena kemiskinan di Indonesia selama tiga tahun terakhir (2006-2008) telah mengalami penurunan yaitu dari 17,75% tahun 2006 menjadi 16,58% tahun 2007 dan menjadi 15,42% tahun 2008 (BPS, 2009). Berdasarkan hasil susenas panel tahun 2009 menunjukkan batas miskin di daerah perkotaan di Indonesia adalah Rp 222.123,-/kapita/bulan dengan jumlah penduduk miskin di perkotaan yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 11,9 juta, sementara

batas miskin di daerah pedesaan di Indonesia adalah Rp 179.835,-/kapita/bulan dengan jumlah penduduk miskin di pedesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 20,6 juta (BPS, 2009).

Karakteristik kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari pendidikan kepala rumahtangga, angka putus sekolah, persentase penolong persalinan, persentase menggunakan air bersih dan persentase menggunakan jamban sendiri.

Tabel 1. Karakteristik Rumahtangga Miskin di Indonesia tahun 2007

Karakteristik Rumahtangga	Miskin (%)	Tidak Miskin (%)
1. Pendidikan Kepala Rumahtangga		
Tidak/belum tamat SD	41,74	t.a.d
SD	38,82	t.a.d
SLTP	11,45	t.a.d
SLTA	7,50	t.a.d
Di atas SLTA	0,49	t.a.d
2. Angka putus sekolah		
Kelompok usia 7-12 tahun	1,78	0,38
Kelompok usia 13-15 tahun	11,22	2,81
3. Penolong persalinan terakhir oleh tenaga kesehatan	55,57	77,08
4. Menggunakan air bersih	32,98	51,16
5. Menggunakan jamban sendiri	51,87	76,06

Sumber: Data dan Informasi kemiskinan 2007, BPS

Dilihat dari tingkat pendidikan kepala rumahtangga, angka putus sekolah, dan kesehatan (penolong persalinan terakhir oleh tenaga kesehatan, menggunakan air bersih, dan menggunakan jamban sendiri) menunjukkan bahwa kualitas hidup rumahtangga miskin di Indonesia memang masih jauh lebih rendah dari rumahtangga yang tidak miskin. Kenyataan bahwa masih terdapat keterbatasan akses rumahtangga miskin pada pendapatan, pendidikan dan kesehatan dapat diduga bahwa kualitas hidup perempuan dan anak-anak juga masih rendah. Selanjutnya berdasarkan data Susenas 2007, BPS, menunjukkan bahwa persentase perempuan sebagai kepala rumahtangga miskin mencapai 12,91 persen, sedangkan untuk rumahtangga tidak miskin mencapai 13,5 persen. Perempuan sebagai kepala rumahtangga patut untuk diperhitungkan karena mereka harus menghadapi beban yang lebih besar, sebagai kepala rumahtangga pencari nafkah sekaligus harus mengasuh dan membesarkan anak-anaknya.

Kesetaran gender atau kesetaraan pembangunan manusia laki-laki dan perempuan dapat dilihat antara lain dari tingkat pendidikan (angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah) dan angka harapan hidup. Data menunjukkan bahwa angka melek huruf dan partisipasi sekolah usia 16-18 tahun, serta GDP

per kapita perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, namun usia harapan hidup perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup perempuan relative masih lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam hal pendidikan.

Tabel 2. Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Harapan Hidup di Indonesia Tahun 2008

Karakteristik Kesetaraan Gender	Laki-Laki	Perempuan
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 tahun ke atas	95,38	89,10
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah:		
7-12 tahun	97,68	97,98
13-15 tahun	84,13	84,69
16-18 tahun	54,81	54,59
Angka Harapan Hidup*	64,6	68,6
GDP (Produk Domestik Bruto) per kapita* (US\$)	4,161	2,138

Keterangan: *) Data tahun 2004 Human Development Report, UNDP 2004
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS

C. PEREMPUAN DAN TANTANGAN EKONOMI

Salah satu masalah kualitas hidup yang dihadapi perempuan di berbagai kawasan adalah masalah kritis ekonomi, yaitu masalah terkait upaya untuk memperoleh sumber-sumber nafkah atau mata pencaharian berkelanjutan dengan tingkat pendapatan yang memadai untuk hidup sehari-hari perempuan dan keluarganya. Salah satu sasaran strategis yang harus dicapai adalah dengan memajukan hak-hak dan kemandirian ekonomi perempuan, termasuk akses mereka atas lapangan kerja, kondisi-kondisi kerja yang memadai serta pengendalian sumber-sumber ekonomi.

Tabel 3. Jumlah Angkatan Kerja menurut Jenis kelamin di Indonesia Tahun 2006-2008 (Ribu)

Kegiatan	2006			2007			2008		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Angkatan Kerja	67.750	38.639	106.389	68.720	41.221	109.941	69.144	42.803	111.947
1. Bekerja	61.977	33.480	95.457	63.148	36.782	99.930	63.899	38.653	102.553
2. Pengangguran	5.773	5.159	10.932	5.572	4.439	20.022	5.245	4.149	9.395
Bukan Angkatan Kerja	12.692	41.370	54.423	13.360	40.817	54.177	13.697	40.997	54.694
1. Sekolah	7.130	6.400	13.530	7.135	6.643	13.777	6.800	6.426	13.226
2. Mengurus Rmt	729	31.249	31.978	1.272	30.717	31.989	1.592	31.179	32.771
3. Lainnya	4.833	4.082	8.914	4.953	3.458	8.411	5.305	3.392	8.697
Total	80.442	80.370	160.812	82.079	82.039	164.118	82.841	83.800	166.641

Sumber: Sakernas 2006, 2007, 2008 BPS.

Jumlah angkatan kerja, khususnya bekerja, di Indonesia selama tiga tahun terakhir (2006-2008) menunjukkan peningkatan, artinya kondisi ketenagakerjaan relative membaik. Namun demikian apabila membanding antara perempuan dan laki-laki nampak bahwa jumlah perempuan bekerja mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan laki-laki namun secara absolute masih jauh dari jumlah laki-laki bekerja (Tabel 3.)

Fenomena yang menarik adalah dalam hal mengurus rumahtangga maka perempuan tetap mendominasi, sesuai peran tradisional yang dilekatkan pada perempuan yaitu mengasuh dan membesarkan anak-anak serta melakukan pekerjaan domestik lainnya. Di sisi lain, sudah nampak pula peningkatan jumlah laki-laki yang mengurus rumahtangga, meski relative masih sangat jauh dibandingkan perempuan. Hal ini secara tidak langsung juga menunjukkan masih banyak perempuan yang mengalami beban kerja ganda, yaitu bekerja dan sekaligus mengurus rumahtangga (mengasuh dan membesarkan anak-anak). Beban kerja ganda bagi perempuan adalah salah satu isu ketidakadilan gender yang perlu mendapatkan perhatian.

Selanjutnya akses perempuan terhadap lapangan kerja dapat dilihat dari jumlah perempuan yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama (Tabel 4.). Perempuan dan laki-laki masih dominan bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. Selanjutnya akses perempuan lebih banyak pada lapangan kerja perdagangan (besar, eceran, rumahtangga, dan hotel) dan jasa serta industri pengolahan, sementara akses laki-laki selain akses pada lapangan kerja perdagangan, pengolahan dan jasa, juga pada bangunan dan angkutan. Hal ini menunjukkan bahwa pintu masuk perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi adalah di sektor dagang, jasa dan industri pengolahan yang lebih dikenal dengan sebutan sektor usaha mikro, kecil, menengah industri (UMKM).

Tabel 4. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut lapangan Pekerjaan Utama dan jenis kelamin di Indonesia tahun 2008-2009

Pekerjaan Utama	Agustus 2008		Februari 2009	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	25.913.925	15.417.781	26.619.551	16.409.942
2	938.427	132.113	990.209	149.286
3	7.128.631	5.420.745	7.324.070	5.291.370
4	183.913	17.201	199.160	10.281
5	5.311.318	127.647	4.491.849	118.846
6	10.514.476	10.707.268	10.640.223	11.196.545
7	5.465.585	713.918	5.151.338	796.335
8	1.028.203	431.782	1.059.193	425.405
9	7.414.800	5.685.017	8.063.524	5.548.317
Jumlah Total	63,899,278	38,653,472	64,539,117	39,946,327

Keterangan:

1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/Agriculture, Forestry, Hunting, and Fishery
2. Pertambangan dan penggalian/Mining and Quarrying
3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry
4. Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas and Water
5. Bangunan/Construction
6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Tangga dan Hotel/Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotel
7. Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/Transportation, Storage, and Communication
8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Financing, Insurance, Real Estate, and Business Service
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/Community, Social and Personal services

Sumber: keadaan Angkatan kerja Indonesia, BPS

Untuk melihat kondisi kerja yang memadai serta sumber-sumber pengendalian ekonomi bagi perempuan dapat dilihat dari sektor pekerjaan (formal/informal) serta status pekerjaan utama yang dimasuki oleh perempuan. Data tabel 5. Menunjukkan bahwa kondisi kerja perempuan masih jauh dari memadai dibandingkan laki-laki karena sebagian besar masih menjadi pekerja sektor informal. Sektor informal merupakan sektor yang hampir tak memiliki perlindungan hukum dan tanpa jaminan untuk keberlanjutannya.

Tabel 5. Prosentase Pekerja Formal dan Informal Menurut Jenis kelamin di Indonesia Tahun 2006-2008

Pekerja	2006		2007		2008	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Formal	32,92	25,80	33,15	25,80	34,08	26,46
Informal	67,08	74,20	66,85	74,20	65,92	73,54
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: Sakernas BS

Sumber-sumber pengendalian ekonomi dapat pula ditunjukkan oleh status atau posisi yang diduduki perempuan dalam lapangan pekerjaan yang dimasukinya. Indikator status pekerjaan dapat dilihat dari empat kategori penduduk bekerja yaitu pekerja berusaha sendiri, pekerja dibayar (buruh), pekerja tak dibayar (keluarga), dan pekerja bebas. Berusaha sendiri dibedakan menjadi dua yaitu mereka yang berusaha (memiliki usaha) tanpa dibantu pekerja dibayar dan mereka yang berusaha dengan dibantu pekerja dibayar. Dua kategori lain adalah pekerja keluarga juga dikenal dengan pekerja tak dibayar, dan pekerja bebas yaitu mereka yang bekerja secara serabutan dan tidak terikat.

Tabel 6. Komposisi Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan jenis Kelamin di Indonesia Tahun 2008

Status Pekerjaan	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)
Berusaha Sendiri	21,00	19,00
Berusaha dibantu Pekerja tak dibayar	25,00	14,00
Berusaha dibantu Pekerja Tetap	4,00	1,00
Buruh/Karyawan	28,00	25,00
Pekerja Keluarga/Pekerja tak dibayar	8,00	33,00
Pekerja bebas pertanian	6,00	5,00
Pekerja bebas non pertanian	8,00	3,00
Total	100,00	100,00

Sumber: Sakernas BPS

Data pada tabel 6. menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup nyata dalam hal status pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki kedudukan dalam pekerjaan yang relatif lebih baik dibandingkan perempuan, yaitu sebagai buruh/karyawan, berusaha dibantu pekerja tak dibayar (pekerja keluarga) dan berusaha sendiri. Sementara perempuan memiliki kedudukan dalam pekerjaan yang relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki,

yaitu sebagai pekerja keluarga/pekerja tak dibayar, buruh/karyawan, dan berusaha sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan masih belum memiliki akses yang memadai dalam sumber-sumber pengendalian ekonomi karena berstatus pekerja keluarga tak dibayar. Selain itu sebagian besar perempuan juga masih bekerja pada pekerjaan bergaji rendah (buruh/karyawan). Keterbatasan akses perempuan dalam sumber-sumber pengendalian ekonomi juga mencerminkan masih adanya ketidakadilan gender dalam bentuk stereotipe dan subordinasi. Stereotipe bahwa pekerjaan perempuan adalah merupakan perpanjangan tugas domestik perempuan, yang memerlukan ketekunan dan kesabaran, dalam membantu usaha yang dimiliki keluarga. Subordinasi manakala diartikan bahwa tugas perempuan ketika bekerja nafkah adalah membantu usaha keluarga, sehingga tak perlu dibayar atau walaupun di upah dengan upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini tentunya juga terkait dengan kondisi tingkat pendidikan perempuan yang relatif masih lebih rendah dari laki-laki.

D. STRATEGI NAFKAH KELUARGA

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah dengan memberikan akses lebih besar dalam usaha dan kerja bagi rumahtangga miskin khususnya, agar mendapatkan nafkah yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Oleh karena itu strategi nafkah rumahtangga dalam kerangka menciptakan mata pencaharian berkelanjutan atau sustainability livelihood agar dapat terus memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan meningkatkan kualitas hidup keluarga menjadi penting. Kerangka mata pencaharian berkelanjutan atau kerangka 'asset/proses/aktivitas' dapat digunakan untuk menganalisa strategi nafkah rumahtangga komunitas agar dapat bertahan hidup dan mengatasi kemiskinannya. Dalam kerangka tersebut, matapencaharian didefinisikan sebagai "aktivitas, asset dan akses, yang secara bersama-sama menentukan kehidupan yang diperoleh oleh individu atau rumahtangga".

Menurut Scoones (1998) asset rumahtangga tersebut mencakup lima dimensi yaitu:

- (1) *Human capital* (pendidikan, keterampilan, dan kesehatan anggota rumahtangga).
- (2) *Physical capital* (peralatan pertanian atau mesin traktor)
- (3) *Social capital* (jaringan sosial dan asosiasi/kelompok/ organisasi yang diikuti).
- (4) *Financial capital dan substitusinya* (tabungan, kredit)

(5) *Natural capital* (sumberdaya alam).

Strategi nafkah rumahtangga atau disebut juga sebagai pola nafkah ganda dapat didefinisikan sebagai "proses-proses dimana rumahtangga membangun suatu kegiatan dan kapabilitas dukungan sosial yang beragam untuk surviva/ bertahan hidup dan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Selanjutnya Scoones (1998) yang membedakan bidang pertanian dan non pertanian, menunjukkan kemungkinan strategi nafkah yang berbeda yang dilakukan oleh komunitas pedesaan, yang mencakup: (1) intensifikasi atau ekstensifikasi pertanian, yaitu tetap berusaha atau bekerja di pertanian dengan mengintensifkan usahanya atau memperluas lahan usaha taninya; (2) diversifikasi nafkah, yaitu melalui penganekaragaman nafkah atau pola nafkah ganda di pertanian dan non pertanian; dan (3) migrasi (keluar) berupa perpindahan dengan sukarela/sengaja atau tidak, yaitu keluar dari pertanian dan memasuki bidang-bidang lain baik di komunitas setempat atau ke luar dari komunitas setempat.

E. POSISI PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA

Dalam konteks relasi gender, maka dapat dikemukakan bahwa konstruksi sosial budaya komunitas setempat telah membentuk laki-laki dan perempuan memiliki asset, akses terhadap sumber daya yang berbeda. Perempuan jarang dijumpai sebagai pemilik lahan, dan karena berpendidikan rendah maka terjadi diskriminasi akses, dan alami subordinasi dalam hal akses terhadap sumber daya produktif maupun pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diversifikasi (pola ragam nafkah ganda) dapat memperbaiki keamanan mata pencaharian rumahtangga dan meningkatkan status perempuan.

Keragaman pola nafkah ganda di pedesaan menyumbang pada keberlanjutan matapencaharian di pedesaan, karena dapat meningkatkan ketahanan atau daya tahan dalam menghadapi bencana yang datang tiba-tiba. Berkaitan dengan hal tersebut, matapencaharian secara individu atau keluarga membentuk pengelompokan ekonomi dan sosial lebih besar untuk mencapai tingkat ekonomi yang besar. Secara umum, ragam pola nafkah ganda menunjukkan fleksibilitas lebih besar karena ada substitusi antara kesempatan yang ada. Salah satu keuntungan strategi nafkah ganda rumahtangga dalam konteks gender adalah dapat memperbaiki kemampuan perempuan dalam penciptaan pekerjaan yang bebas, memperbaiki perubahan pada status gizi anak karena proporsi besar pendapatan tunai perempuan dimanfaatkan untuk kesejahteraan keluarga. Di sisi lain, kerugian strategi nafkah ganda rumahtangga yang bisa dialami oleh perempuan adalah bila laki-laki lebih dominan untuk

dapat keuntungan dari kesempatan beragam pola nafkah ganda, sedangkan perempuan diatur pada bidang domestik dan produksi makanan subsisten.

Fenomena perempuan tetap pada pekerjaan domestik dan produksi makanan subsisten sebagai perpanjangan peran tradisionalnya dan menjadi pekerja keluarga yang tak dibayar merupakan contoh nyata penerapan pendekatan pembangunan bagi perempuan melalui pendekatan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan menurut Moser (1990) adalah pendekatan yang fokus pada peran reproduktif (domestik) perempuan dan menempatkan perempuan di arena pribadi, sementara laki-laki dipandang sebagai kelompok masyarakat yang aktif dalam arena publik. Pendekatan ini mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program pembangunan yang dititik beratkan untuk memenuhi kebutuhan fisik keluarga seperti menyediakan perumahan, sandang dan pangan, kebersihan, kesehatan dan gizi keluarga, mal-nutrisi anak, cara memasak, menyiapkan makanan dan lain-lain.

Meskipun demikian, pendekatan tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan atau kualitas hidup perempuan itu sendiri karena tidak memahami kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itulah, penting untuk memahami dan mempertimbangkan kebutuhan praktis dan strategis gender dalam tujuan program pembangunan agar lebih berkeadilan dan berkesetaraan gender (Moser, 1990).

Dengan demikian, perlu dilakukan terlebih dahulu analisis situasi relasi gender dalam kerangka mata pencaharian berkelanjutan di komunitas agar posisi kaum perempuan dalam strategi nafkah rumahtangga yang mencakup: pembagian kerja, akses dan kontrol terhadap sumberdaya (asset manusia, sosial, fisik, alam, dan finansial) dan manfaat serta partisipasi dalam kelembagaan dapat diidentifikasi. Hal ini bermanfaat bagi tindak lanjut upaya pemberdayaan kaum perempuan yang terpinggirkan dari akses terhadap sumberdaya dan mengubah hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan agar strategi nafkah rumahtangga dapat menciptakan mata pencaharian yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga maupun perempuan itu sendiri. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bagaimana perempuan meski memiliki kontribusi nyata dalam ekonomi rumahtangga namun hampir tidak memiliki kontrol terhadap sumberdaya lahan, teknologi, dan pendidikan/pelatihan. Isu ketidakadilan gender seperti beban kerja ganda, subordinasi, stereotype dan marginalisasi di bidang ekonomi masih menjadi fenomena yang mengakibatkan strategi nafkah rumahtangga belum mampu menciptakan mata pencaharian berkelanjutan yang dapat menjamin peningkatan kesejahteraan keluarga.

.KESIMPULAN

Upaya peningkatan kualitas hidup atau kesejahteraan kaum perempuan dapat dicapai dengan cara memperkuat (empower) kaum perempuan yang masih termarginalkan atau terpinggirkan dan menciptakan hubungan yang lebih setara dan adil antara laki-laki dan perempuan. Artinya, melalui pendekatan pemberdayaan kaum perempuan dilakukan dua hal, yaitu: pertama, memenuhi kebutuhan praktis baik laki-laki maupun perempuan yang dapat memperbaiki kondisi kehidupan mereka (pendidikan, kesehatan, ekonomi); dan kedua memenuhi kebutuhan strategis, yaitu melibatkan perempuan sebagai pelaku dan penentu kegiatan pembangunan. Pemenuhan kebutuhan strategis perempuan dapat dilakukan melalui penyadaran atau perubahan pola pikir laki-laki dan perempuan, penguatan rasa percaya diri, pendidikan, dan pengembangan organisasi perempuan (Moser, 1990).

Dalam kerangka mata pencaharian berkelanjutan maka upaya pemberdayaan perempuan melalui pemenuhan kebutuhan praktis dilakukan dengan mengembangkan prioritas kebijakan pembangunan pada: (1) peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (pendidikan dan ketrampilan, kesehatan), (2) penyediaan fasilitas infrastruktur (pasar, mempercepat alur informasi, peningkatan mobilitas orang, sumberdaya dan output), (3) penyediaan fasilitas kredit khususnya pada skala usaha UMK, untuk mendukung rumahtangga dan individu meningkatkan penghasilan, (4) dukungan kelembagaan yang mampu membangun hubungan antara pemerintah desa, swasta dan usaha rumahtangga, (5) penyediaan jaring pengaman sosial bagi kelompok yang paling rentan (tak memiliki lahan, perempuan, lansia) yang perlu dibantu.

Sedangkan upaya pemberdayaan melalui pemenuhan kebutuhan strategis dilakukan dengan penyadaran perubahan pola pikir para pengambil keputusan di setiap lini agar lebih responsive gender dalam pelaksanaan program-program pembangunan, serta memperkuat kelembagaan ekonomi berbasis perempuan melalui peningkatan kapasitas kader-kader perempuan.

. REKOMENDASI

Indikator kesejahteraan perempuan dapat dilihat dari posisi kaum perempuan dalam strategi nafkah rumahtangga dengan menggunakan kerangka mata pencaharian berkelanjutan, berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemampuan perempuan dalam menciptakan peluang

- usaha dan kerja.
2. Meningkatnya akses dan kontrol perempuan terhadap sumberdaya/asset rumahtangga (manusia, sosial, teknologi, financial dan alam).
 3. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam lembaga ekonomi (koperasi, kredit, pasar).
 4. Adanya perlindungan hukum bagi sektor informal yang dimasuki perempuan.
 5. Meningkatnya status pekerjaan utama kaum perempuan dan upah yang layak sesuai statusnya.
 6. Menguatnya kelembagaan ekonomi berbasis perempuan.

PUSTAKA ACUAN

- BPS. 2008. Sakernas
BPS.2008. Keadaan Angkatan kerja Indonesia.
BPS. 2008. Indikator Kesejahteraan Rakyat
BPS. 2009. Perkembangan beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia
Canadian Council for International Co-operation, 1991. Two Halves Make a Whole. Balancing Gender Relations in Development.
Moser. Caroline ON. 1990. Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training. Routledge. London
Scoones. 1998. Sustainable Livelihood.
UNDP. 2004. Human Development Report.
KPPA. 2008. Pembangunan berbasis Gender. dalam <http://www.menegpp.go.id/aplikasidata/>

BIOGRAFI PENULIS

Titik Sumarti, Saat ini bekerja sebagai Dosen IPB

